

**Peran E-government, Abnormal Accrual,  
Maturitas Sistem Pengendalian Internal,  
dan Transparansi Terhadap**



# **KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAN KORUPSI**

**PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**



Rindu Rika Gamayuni | Adilah Sabrina Muti'ah | Febrina Handayani | Safira Nada Sabila  
Bangun Tegar Firansyah | Assyifa Qolbi Maharani | Chyntia Dwi Putri

**Peran E-government, Abnormal Accrual,  
Maturitas Sistem Pengendalian Internal,  
dan Transparansi Terhadap**

**KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN  
DAN  
KORUPSI  
PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Buku monograf ini membahas secara lebih mendalam mengenai Peran E-government, Abnormal Accrual, Maturitas Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. Buku ini merupakan literatur review yang membahas secara mendalam mengenai fenomena, definisi setiap variable yaitu E-government, Abnormal Accrual, Maturitas Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, juga membahas pengukuran variabel dan sumber data, selanjutnya memaparkan pengaruh E-government, Abnormal Accrual, Maturitas Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi terhadap Korupsi dan Kualitas Pelaporan Keuangan, serta hasil riset sebelumnya terkait korupsi dan kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah.

Akhir kata, semoga Buku Monograf ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan pembaca umum lainnya untuk menambah wawasan dan sebagai bahan referensi atau sumber untuk menulis karya ilmiah.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekaediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



**PERAN E-GOVERNMENT, *ABNORMAL*  
ACCRUAL, MATURITAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN  
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS  
PELAPORAN KEUANGAN DAN KORUPSI  
PADA PEMERINTAH DAERAH  
DI INDONESIA**

Rindu Rika Gamayuni  
Adilah Sabrina Muti'ah  
Febrina Handayani  
Safira Nada Sabila  
Bangun Tegar Firansyah  
Assyifa Qolbi Maharani  
Chyntia Dwi Putri



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

**PERAN E-GOVERNMENT, *ABNORMAL ACCRUAL*,  
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN  
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS PELAPORAN  
KEUANGAN DAN KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH  
DI INDONESIA**

**Penulis** : Rindu Rika Gamayuni  
Adilah Sabrina Muti'ah  
Febrina Handayani  
Safira Nada Sabila  
Bangun Tegar Firansyah  
Assyifa Qolbi Maharani  
Chyntia Dwi Putri

**Desain Sampul:** Eri Setiawan

**Tata Letak** : Salsabela Meiliana Wati

**ISBN** : 978-623-120-286-4

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi** :  
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992  
Surel: eurekamediaaksara@gmail.com  
Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Buku monograf ini membahas secara lebih mendalam mengenai Peran *E-government*, *Abnormal Accrual*, Maturitas Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. Buku ini merupakan literatur review yang membahas secara mendalam mengenai fenomena, definisi setiap variable yaitu *E-government*, *Abnormal Accrual*, Maturitas Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, juga membahas pengukuran variabel dan sumber data, selanjutnya memaparkan pengaruh *E-government*, *Abnormal Accrual*, Maturitas Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi terhadap Korupsi dan Kualitas Pelaporan Keuangan, serta hasil riset sebelumnya terkait korupsi dan kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah.

Akhir kata, semoga Buku Monograf ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan pembaca umum lainnya untuk menambah wawasan dan sebagai bahan referensi atau sumber untuk menulis karya ilmiah.

Bandar Lampung, Januari 2024

Salam Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN</b>	
<b>PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>1</b>
A. Fenomena/Permasalahan Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah.....	1
B. Definisi Kualitas Pelaporan Keuangan.....	8
C. Pengukuran Kualitas Pelaporan Keuangan.....	11
<b>BAB 2 KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>14</b>
A. Fenomena / Permasalahan Korupsi Pada Pemerintah Daerah .....	14
B. Definisi Korupsi Pada Pemerintah Daerah .....	19
C. Pengukuran Korupsi Pada Pemerintah Daerah .....	21
<b>BAB 3 E-GOVERNMENT .....</b>	<b>24</b>
A. Fenomena/Permasalahan <i>E-government</i> Pada Pemerintah Daerah.....	24
B. Definisi <i>E-government</i> .....	29
C. Pengukuran <i>E-government</i> dan Sumber Data.....	38
D. Pengaruh <i>E-government</i> Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan .....	40
E. Pengaruh <i>E-government</i> terhadap Korupsi.....	41
<b>BAB 4 ABNORMAL ACCRUAL .....</b>	<b>43</b>
A. Fenomena / Permasalahan Abnormal Accrual Pada Pemerintah Daerah.....	43
B. Definisi <i>Abnormal Accrual</i> .....	45
C. Pengukuran <i>Abnormal Accrual</i> dan Sumber Data .....	46
D. Pengaruh <i>Abnormal Accrual</i> Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan .....	48
E. Pengaruh <i>Abnormal Accrual</i> Terhadap Korupsi .....	49
<b>BAB 5 MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN</b>	
<b>INTERNAL .....</b>	<b>51</b>
A. Fenomena / Permasalahan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pada Pemerintah Daerah .....	51
B. Definisi Maturitas System Pengendalian Internal .....	53

C. Pengukuran Maturitas System Pengendalian Internal dan Sumber Data .....	54
D. Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan .....	57
E. Pengaruh Maturitas System Pengendalian Internal Terhadap Korupsi .....	59
<b>BAB 6 TRANSPARANSI.....</b>	<b>61</b>
A. Fenomena / Permasalahanan Transparansi Pada Pemerintah Daerah .....	61
B. Definisi Transparansi.....	65
C. Pengukuran Transparansi dan Sumber Data .....	66
D. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.....	69
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>94</b>



**PERAN E-GOVERNMENT, *ABNORMAL*  
ACCRUAL, MATURITAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN  
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS  
PELAPORAN KEUANGAN DAN KORUPSI  
PADA PEMERINTAH DAERAH  
DI INDONESIA**

Rindu Rika Gamayuni  
Adilah Sabrina Muti'ah  
Febrina Handayani  
Safira Nada Sabila  
Bangun Tegar Firansyah  
Assyifa Qolbi Maharani  
Chyntia Dwi Putri



# BAB

# 1

## KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

### A. Fenomena/Permasalahan Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah

Seluruh aspek perekonomian yang berkaitan dengan layanan dan lembaga pemerintahan merupakan sektor publik. Sektor publik adalah komponen yang berkaitan kuat dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, sektor publik memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti layanan publik yang dimiliki pemerintah. Dalam keuangan pemerintah daerah tentunya terikat erat dengan cara pengelolaan aset serta pendapatan yang dimiliki oleh daerah yang diatur pada peraturan, regulasi, maupun undang-undang yang berlaku (Yulinchton et al., 2022).

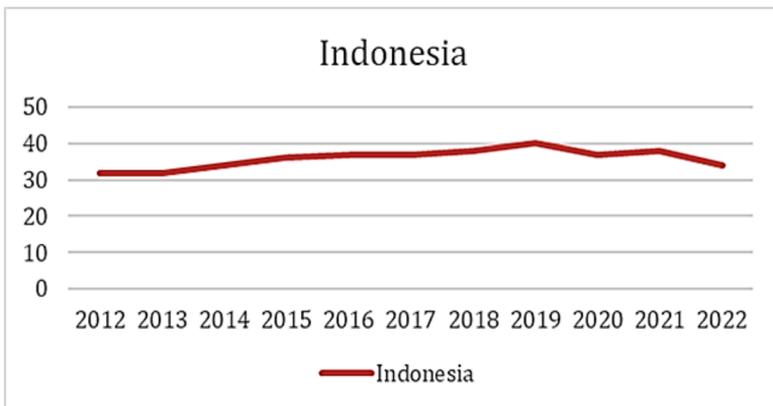
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur stabilitas aktivitas pemerintahannya. Pemerintah daerah perlu mengamati berbagai macam potensi maupun permasalahan yang dialami oleh daerahnya. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat maupun lembaga terkait. Penguatan tuntutan atas akuntabilitas serta transparansi atas seluruh lembaga publik daerah merupakan bentuk perkembangan dari aktivitas sektor publik di Indonesia. Akuntabilitas mengacu terhadap suatu wujud kewajiban untuk bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan dari pengimplementasian tugas organisasi guna mencapai tujuan atau sasaran yang sebelumnya sudah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban yang

# BAB 2

## KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH

### A. Fenomena/ Permasalahan Korupsi Pada Pemerintah Daerah

Korupsi merupakan permasalahan fenomenal yang tidak ada akhirnya dan selalu menjadi fokus perhatian bagi seluruh negara di dunia (Lustrilanang et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh korupsi yang merupakan ancaman politik yang konstan atas demokrasi dunia. Selain itu, kerugian yang diciptakan adanya tindak korupsi merupakan permasalahan berat karena dapat merugikan perekonomian negara yang berdampak buruk bagi seluruh masyarakat Indonesia (Clark, 2017).



Gambar 2. 1. Linechart Data CPI Indonesia Tahun 2012 - 2022

Sumber: *Transparency International (2022)*

# BAB

# 3

# E-GOVERNMENT

## A. Fenomena/Permasalahan *E-government* Pada Pemerintah Daerah

*E-government* merupakan elemen penting dalam menjalankan sistem pemerintahan suatu negara sebagai salah satu tolok ukur tata kelola negara yang baik (World Bank, 1996). *E-government* dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem pemerintahan sehingga mampu menekan asimetri informasi yang umum terjadi antara pemerintah dan masyarakat (Castro & Lopes, 2022; Elbahnasawy, 2014; Silal et al., 2023; Suardi, 2021). Pemerintah sebagai *agent* memiliki peran menjalankan sistem pemerintahan dengan menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat sehingga perlu bagi masyarakat sebagai *principal* untuk mengetahui bagaimana sumber daya negara dikelola (Bergman & Lane, 1990).

Secara global, *E-government* dapat diukur dengan menggunakan pengukuran dari *World Bank*. Indeks ini sudah diinisiasi sejak tahun 2001 dengan menilai pengembangan *E-government* dari tiga aspek berbeda, yaitu *Human Capital*, *Online Service*, dan *Infrastructure Telecommunication* (World Bank, 2001). Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN dengan *E-government* yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian hasil penilaian *E-government Development Index* (EGDI) oleh *World Bank* sejak tahun 2012 – 2022.

# BAB 4 | *ABNORMAL ACCRUAL*

## **A. Fenomena/Permasalahan Abnormal Accrual Pada Pemerintah Daerah**

Dalam 78 tahun masa pemerintahan Negara Republik Indonesia, penerapan sistem akuntansi pada pemerintahan baru dilaksanakan sejak tahun 2003 yang dimulai dengan diterbitkannya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan ini mengharuskan presiden untuk menyampaikan RUU terkait dengan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBN kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penerapan sistem akuntansi pada pemerintah ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, hal ini dibuktikan dengan mulai bermunculannya peraturan-peraturan baru terkait dengan standar akuntansi pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian diganti menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Kemunculan paradigma baru “New Public Management” (NPM) telah merambah di banyak negara termasuk Indonesia yang salah satunya ditandai dengan penerapan kebijakan akuntansi akrual. Regulasi yang mendasari penggunaan akuntansi berbasis akrual di Indonesia sendiri antara lain terdapat pada UU nomor 32 tahun 2004, UU nomor 33 tahun 2004, UU nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004, UU nomor 25 tahun 2004, dan UU nomor 15 tahun 2004, dan yang terbaru yaitu

# BAB 5

## MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

### A. Fenomena / Permasalahan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pada Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintah di tingkat daerah. Pemerintah daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dipimpin oleh kepala daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada DPRD sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat daerah (Sunarso, 2023). Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahannya mencakup pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien dan efektif, ekonomis, terbuka, dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan (Mahrus, 2021).

# BAB

# 6

# TRANSPARANSI

## A. Fenomena / Permasalahan Transparansi Pada Pemerintah Daerah

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik kepadapihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2005). Transparansi menjadi salah satu asas yang harus dipenuhi oleh pemerintah dikarenakan oleh tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Timbulnya tuntutan dari masyarakat yang semakin meningkat disebabkan oleh perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi menyebabkan tantangan pemerintah semakin besar dalam bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya daerahnya.

Selanjutnya Tjokromidjoyo (2003:123), menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. *Good Governance* tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup. Oleh karena *good governance* tidak membolehkan cara-cara yang tertutup, Gaffar (dalam Rosyada dkk 2003:184), mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparans yaitu sebagai berikut : 1)Penetapan posisi jabatan atau kedudukan; 2)

## KESIMPULAN

Korupsi masih menjadi permasalahan penting di Indonesia, ditunjukkan dengan angka indeks persepsi korupsi dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa bukti fakta lainnya. Literatur riset sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan faktor yang sangat penting dan berperan dalam mengatasi korupsi. Demikian pula faktor lainnya seperti *E-government*, Maturitas Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi. Fenomena menunjukkan tingginya tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia yang mengalami peningkatan khususnya di tahun 2022. Dengan adanya pengukuran-pengukuran korupsi yang telah dijelaskan dalam buku ini akan membantu para peneliti menganalisis dan mencari jalan keluar untuk dapat menekan dan mengontrol tingkat korupsi di kemudian hari.

*E-government* merupakan implementasi sistem teknologi dan komunikasi berbasis digital pada lembaga pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya. *E-government* diterapkan dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat menekan asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Pengembangan *E-government* perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan tata kelola negara dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga mampu menciptakan kontrol atas korupsi yang baik untuk menekan tingkat korupsi dan mencegah terjadinya korupsi di kemudian hari.

Penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan tranparansi, akuntabilitas, dan nilai informasi atas pelaporan keuangan pemerintah. Selain itu, penerapan basis akrual pada pemerintah juga dapat membantu pemerintah daerah untuk mengelola akun-akun akrual seperti kerugian piutang, beban depresiasi/amortisasi, beban hutang dan lainnya agar menjadi lebih akuntabel dan transparan. Namun keberadaan *abnormal accrual* ini tentunya dapat menjadi peluang bagi pihak pemerintah daerah untuk mengelola angka-angka pada

laporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil dari pengambilan keputusan dan relevansi informasi yang disajikan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Banyaknya kasus-kasus korupsi besar yang diungkap oleh lembaga anti korupsi Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi indikator pentingnya peran SPIP dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik kepadapihak-pihak yang membutuhkan informasi. Tingkat transparansi data Indonesia masih tertinggal di kawasan Asia Pasifik. Indikator keterbukaan data yang dikutip Indeks Tata Kelola Sumber Daya 2017 menempatkan Indonesia di bawah Australia, India, dan Filipina, hal ini dapat menyumbangkan dampak negative pada tata kelola negara Indonesia. Literatur riset sebelumnya menunjukkan pentingnya transparansi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi korupsi pada pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Pakpahan, R., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2022). Influence Of Internal Control System Weaknesses And Audit Quality On The Quality Of Local Government Financial Reports In Indonesia With Good Government Governance As Moderating. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 461–474. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.463>.
- Afifah, N. N., & Rahmatika, D. N. (2014). Factors Influencing The Quality of Financial Reporting and Its Implications on Good Government Governance (Research on Local Government Indonesia). *International Journal of Business Economic and Law*, 5(18), 111–121.
- Afriani, K. & Wahid, F. Dampak *E-government* pada good governance: temuan empiris dari kota jambi. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009)*.
- Ageng, Yudha Rahmat, and Fadlil Usman. "Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Opini Audit." *Jurnalku* 3.4 (2023): 390-401.
- Albar, T. M. , F. A. F. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi, Etika Organisasi, Keadilan Kompensasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Fraud (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 3, 527–537.
- Albrecht, C., Kranacher, M., & Albrecht, S. (2011). Asset Misappropriation Research White Paper for the Institute for Fraud Prevention.
- Andersen, E.S., &Jessen, S.A. (2003). Project Maturity in Organizations. *International Journal of Project Management*, Vol. 21, pp.457-461.

- Asfiryati, D., 2017, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, Februari: 1986-1999
- Asiah, N. (2019). The effect of human resources competencies and regional financial supervision on the quality of financial statements of bandung regional government. 1-8. <http://elibrary.unikom.ac.id>.
- ASPAN, & UNDESA. (2001). *Benchmarking e-government*.
- Astuti, E., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2023). Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12, 1-12. <http://Ejournal.S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting>.
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 7(3), 2112-2120.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022*.
- Bandiera, O., Prat, A., Valletti, T., Bandiera, O., & Prat, A. (2008). Evidence from a Policy Experiment Spending : Evidence from a Policy Experiment. 6(4).
- Bastian, I. (2023). *Public Sector Accounting* (1st ed.). Universitas Terbuka.
- Bastian, I., 2006, *Akuntansi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga.
- Bauhr, M., Czibik, A., de Fine Licht, J., & Fazekas, M. (2019). Lights on the shadows of public procurement: Transparency as an antidote to corruption. *Governance*, 1-29.

- Beest, F. Van, & Boelens, S. (2009). Quality of Financial Reporting : measuring qualitative characteristics. *NiCE Working Paper* 09-108, April, 1-41. [www.ru.nl/publish/pages/516298/nice\\_09108.pdf](http://www.ru.nl/publish/pages/516298/nice_09108.pdf).
- Bejo, R. (2023). Presiden Jokowi ambil alih perbaikan jalan di Lampung, pengamat nilai itu “tampan buat pemerintah daerah.” *BBC.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-65467866>
- Bergman, M., & Lane, J. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. <https://doi.org/10.1177/0951692890002003005>.
- BPKP. (2019). *Maturitas SPIP BPKP*. <https://www.bpkp.go.id/spip/konten/4144/Hasil-Penilaian-SPIP.bpkp>
- Castro, C., & Lopes, I. C. (2022). *E-government as a Tool in Controlling Corruption*. *International Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2076695>.
- Chen, L., & Aklikokou, A. K. (2019). Relating *E-government* development to government effectiveness and control of corruption : a cluster analysis. *Journal of Chinese Governance*, 0(0), 1-19. <https://doi.org/10.1080/23812346.2019.1698693>.
- Christiaens, J., & Van Peteghem, V. (2007). Governmental Accounting Reform: Evolution of the Implementation in Flemish Municipalities. *Financial Accountability and Management*, 23(4), 375-399. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2007.00434>.
- Cinintya, C. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Hasil Audit Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Universitas Lampung.
- Clark, A. K. (2017). Measuring Corruption: Transparency International’s “ Corruption Perceptions Index.”

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (1992). *Internal Control-Integrated Framework*. Durham: COSO
- Cressey, D. R. (1950). *The Criminal Violation Of Financial Trust*.
- Duadji, N. (2012). Good Governance Dalam Pemerintah Daerah. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan MIMBAR*, 28(2), 201-209.
- Elbahnasawy, N. G. (2014). *E-government , Internet Adoption , and Corruption : An Empirical Investigation*. *World Development*, 57, 114-126. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.005>.
- Erawati, Teguh & Hamanay, Antonius Sahaduta. (2022). Pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Studi kasus pada Desa di kecamatan Pakem kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 10(1), 15-22.
- Farida, N. I., Suyono, N. A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi, Kompetensi Akuntansi, Supervision, Accountability, Dan Transparency Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Sejumlah Desa Di Kabupaten Purworejo). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(2).
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., Arfiansyah, Z., (2022). Kualitas laporan keuangan di indonesia: transparansi informasi keuangandan karakteristik pemerintah daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 4(2), 181-197.
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535-559. doi:10.1108/ijpsm-06-2019-0173
- Gamayuni, R. R. (2018). *Basis Akrual*. Pusaka Media.

- Gamayuni, R. R. (2018). The effect of internal auditor competence and objectivity, and management support on effectiveness of internal audit function and financial reporting quality implications at local government. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 11(3), 248-261. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2018.093951>.
- Gibsi Ompusunggu, S., & Valiant Salomo, R. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 12, Issue 2).
- Gedeona, H. (2005). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah.
- Halter, M., De, M., & Halter, R. (2009). Transparency to reduce corruption? Dropping hints for private organizations in Brazil. *Journal of Business Ethics*.
- Hartono, & Ramdany. (2020). Pengaruh SAP, Pengendalian Intern dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 14-23.
- Hasyim, Mahrus. "Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional." *Mimbar Keadilan* 14.1 (2021): 95-106.
- Haustein, E., & Lorson, P. C. (2023). Transparency of Local Government Financial Statements: Analyzing Citizens' Perceptions. *Financial Accountability & Management*, 39(2), 255-446. <https://doi.org/10.1111/faam.12353>
- Heryana, T. (2013). Pengaruh Penerapan *E-government* Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.17509/jrak.v1i1.6572>.

- IIA (The Institute of Internal Auditors). (2013). Practice Guide Selecting, Using, and Creating Maturity Models: A Tool for Assurance and Consulting Engagements. *The Institute of Internal Auditors (Global), US*.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jakarta (Id): Ri* (2004).
- Indrajit, R. E. (2007). Electronic Government in Action: Strategi Implementasi di Berbagai Negara. Aptikom.
- Irwansyah, Hidayati, T., & Hudayah, S. (2022). The effect of E-government on local government performance accountability in indonesia. *International journal of ebusiness and egovernment studies*, 14(2), 126-147. <https://doi.org/10.34109/ijepeg.202214150>.
- Jauhari, H., Hazisma, S., & Dewata, E. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91-103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>.
- Jimenez, J. L., & Albalate, D. (2018). Transparency and Local Government Corruption: What Does Lack of transparency Hide? *European Journal of Government and Economics*, 7(2), 106-122.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2), 213-221.
- Jultri, A., Made, A., & Y., D. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan New Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal riset mahasiswa akuntansi (JRMA)*, IX(1), 1-13.

- Khairudin, & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 137-154.
- Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1), 1-13.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Kini, W., Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2021). Pengaruh Opini Audit, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kasus Korupsi Di Daerah. *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113-127. <https://doi.org/10.26460/Ad.V4i2.8046>.
- Kompas.com. (18 Agustus 2022). KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel.
- Korutaro Nkundabanyanga, S., Tauringana, V., Balunywa, W., & Naigo Emitu, S. (2013). The association between accounting standards, legal framework and the quality of financial reporting by a government ministry in Uganda. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 3(1), 65-81. doi:10.1108/20440831311287709.
- Krina, Loina Lalolo. (2013). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kurniasih, D., Fidowaty, T. & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh implementasi kebijakan *E-government* terhadap kinerja aparatur kota cimahi. *Sosiohumaniora*, 15(1), 6 -14.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional *E-government*: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122-136. [https://doi.org/10.1016/S0740624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740624X(01)00066-1).

- Listivaniputri, A., & Yuhertiana, I. (2022). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Yang Disurvei KPK Tahun 2018). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 1965-1975.
- Lubis, Nasrul Kahfi. (2017). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan dan pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal penelitian ekonomi akuntansi (jensi)*, 1(7), 124-136.
- Lustrilang, P., Suwarno, Darussalam, Rizki, L. T., Omar, N., & Said, J. (2023). The Role of Control of Corruption and Quality of Governance in ASEAN : Evidence from DOLS and FMOLS Test. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2154060>
- Maspaitella, M. R., & Mokodompit, M. P. (2022). The Quality of Local Government Financial Report. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6493>.
- Masyitoh, Rizki Diyah, et al. "Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun." *Simpodium Nasional Akuntansi 17.100* (2015): 1-26.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Maulana, Muhammad Rengga. *Tinjauan terhadap Evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah X oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah*. Diss. Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022
- Maulana, Zefri & Lubis, Nasrul Kahfi. (2020). PENGARUH TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4(1), 1-14.
- Maulida, Rizki Wibias Anwar. Analisis Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Opini

- Laporan Keuangan. Diss. Universitas Jenderal Soedirman, 2017.
- MENPANRB, H. (2020). Hasil Survei PBB, “e-government” Indonesia Naik Peringkat. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/hasil-survei-pbb-e-government-indonesia-naik-peringkat>
- Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesian Local Government: Study On Triangle Fraud Theory. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 536-552.
- Muraina, S. A., & Dandago, K. I. (2020). Effects of implementation of International Public Sector Accounting Standards on Nigeria’s financial reporting quality. *Internasional Journal of Public Sector Management*, 33(2/3), 323-338. doi:10.1108/ijpsm-12-2018-0277.
- Mursyidi. (2015). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Ningsih, S. T. S., & Haryanto. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1-11.
- Nogueira, S. P., dan Jorge, S. M., 2017, The Perceived Usefulness Of Financial Information For Decision-Making In Portuguese Municipalities: The Importance Of Internal Control, *Journal of Applied Accounting Research*, Vol 18, No. 1, Februari: 116-136.
- Nordiawan, D. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat.
- Nurindahsari, R. & Trisyanto, R. (2022). Pengaruh penerapan sistem informasi *E-government* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 251-257.

- Nuryawati, Lina. Analisis Hubungan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Pengelolaan Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Di Indonesia). Diss. Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Oktavia, R., Dewi, F. G., & Fathia, S. N. (2022). The Global Study : Tackle Corruption through Good Government Governance. 6(5), 4391-4402.
- Ompusunggu, Sensia Gibsi, and Roy Valiant Salomo. "Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5.1 (2019): 78-86.
- Padang, Novi Natalia. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 1. 2022.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2003). Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2003). Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2004). Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2018). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Pemerintah Pusat Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2022). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
- Pemerintah Republik Indonesia (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia;
- Perdana, A. I., & Prasetyo, T. J. (2023). Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, Dan APBD Memengaruhi Tingkat Korupsi Di Pemerintahan Daerah. *JREA: Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 74-89.
- Pippidi, A., & Dadašov, R. (2016). Measuring Control of Corruption by a New Index of Public Integrity. *European Journal on Criminal Policy and Research*, July.
- Pramita, I. I. G. A. A. P., & Dharma, S. I. D. G. (2018). EFFECT OF APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE, GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND APPARATUS ON QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 6(June), 496-504.
- Pratiwi, N. R., Diana, N., & Junaidi. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan desa di kecamatan gondang kabupaten nganjuk. *E-Jra*, 11(09), 84-92.
- Prayogo, Imam Surya. Setiany, Erna. (2020). The Influence of Government Transparency, Implementation of the Government Accounting Standards and Internal Control System on Quality of Financial Statement (A Survey Conducted in the Village Administration Bandung

- Regency, Indonesia). *Scholars Middle East Publishers*, 6(7), 174-181. <https://doi.org/10.36348/sb.2020.v06i07.001>.
- Priatnasari, Y., & Suhardjanto, D. (2020). Regional Financial Characteristics and Public Transparency Towards Frequency of Fraud in the Local Government. *The Indonesian Accounting Review*, 10(2), 201-214.
- Purnomo, A. Y. P., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Good Governance Dan E-government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1-20.
- Puspitarini, R. (2023). Application of E-government to financial accountability in the Surabaya City. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 503-513. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i3.6844>.
- Rahayu, K. N. S., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 464-471.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431-450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2021). The Determinants of Frauds in Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 37-50.
- Ramdany, & Setiawan, Y. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JURNAL AKUNTANSI*, 10(1), 148-164.
- Redjo, Paulina R. D. (2018). EFEK MODERASI PADA PENGARUH TRANSPARANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2).

- Rifandi, Zaizar Wiet. (2019). PENGARUH IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(1), 1-17.
- Rohmatun, A., Azizah, N., & Najicha, F. U. (2022). Law , Development & Justice Review Pengoptimalan *E-government* Di Indonesia Berdasarkan Prinsip- Law , Development & Justice Review. *Law, Development & Justice Review*, 5(3), 237-247.
- Rompas, F. V., dan Kindangen, W. D. (2022). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 461-468.
- Safkaur, O., & Sagrim, Y. (2019). Problems Affecting Financial Reporting Empiric Quality Good Governance Investigation. *International Journal of Economics and Finansial Issues*, 9(4), 241-249. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8468>
- Sari, L. P., Andayani, T. D., Moegiri., & Riswan. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Transparansi, Dan Moralitas Terhadap Kecurangan Dana BOS Pada SMA Kabupaten Pematang. *Jurnal Neraca*, 19(1), 15-28.
- Sasmitha, R. P. H. (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Bpk Terhadap Understandability Dalam Kualitas Laporan Keuangan. *Modus*, 33(1), 98- 119. <https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4171>
- Sayuti, J.J. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16-28.

- SD, W., Monoarfa, R., Usman. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Transparansi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Laporan Keuangan. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 115-122.
- Selvia, D. E., & Arza, F.I. (2023). Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(1), 1206-1223.
- Setianingrum, R. D., & Haryanto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1-15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Silal, P., Jha, A., & Saha, D. (2023). Examining the role of *E-government* in controlling corruption : A longitudinal study. *Information & Management*, 60(1), 103735. <https://doi.org/10.1016/j.im.2022.103735>.
- Sopannah. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Studi di Kabupaten/Kota Malang Jawa Timur. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1160-1173.
- Suardi, I. (2021). *E-government, Governance and Corruption in ASIAN Countries*. <https://doi.org/10.33555/embm.v8i2.180>.
- Sumantri, I. (2023). Transparansi Dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Fraud. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 97-109.
- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Sinar Grafika.
- Surya Prayogo, I., & Setiany, E. (2020). The Influence of Government Transparency, Implementation of the Government Accounting Standards and Internal Control System on

Quality of Financial Statement (A Survey Conducted in the Village Administration Bandung Regency, Indonesia). *Scholars Bulletin*, 6(7), 174-181. <https://doi.org/10.36348/sb.2020.v06i07.001>.

Suryanto, 2017, Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, *Jurnal Agregasi*, Vol. 5, No. 1, Mei: 72-91.

Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). *E-government*, audit opinion, and performance of local government administration in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 6-22. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2>.

Syahrir, Riri Safira, and Elly Suryani. "Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017)." *JAF (Journal of Accounting and Finance)* 4.1 (2020): 20-28.

Syamsul & Zuhroh, S. (2021). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT: DAMPAKNYA PADA TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 1-10.

Taewoo, N. (2018). Examining the anti-corruption effect of *E-government* and the moderating effect of national culture: A cross-country study.

Tahir, S. Y., Malia, E. , Faisol, I. A., (2020). Pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengetahuan kepala desa, dan transparansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di kabupaten pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue*, 1(1), 20-29.

Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/are>

Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Wijaya, N. (2018). PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (GGG) DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS

PELAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat dan Banten). *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v2i1.975>.

Umar, H., & Irsan, M. N. (2018). The Influence of the Government Internal Control System and Internal Audit on Corruption Prevention Mediated By Implementation of Actuals Based Accounting. *Saudi Journal of Business and Management Studies (SJBMS)*, 3(3).

UNDESA. (2022). *E-government Survey 2022 E-GOVERNMENT SURVEY* 2022. [https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2022-09/Web version E-government 2022.pdf](https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2022-09/Web%20version%20E-government%202022.pdf)

United Nations. (2003). UN *E-government* Knowledgebase. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center>

Walsh, J. P., & J. K. Seward. (1990). On The Efficiency Of Internal And External Corporate Control Mechanisms. *Academy Of Management Review*, Vol. 15, No. 3, pp. 421-458

Warkini., Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi LKPD Berpengaruh Terhadap Kasus Korupsi: Benarkah? *Akuntansi dewantara*, 4(2), 113-127.

West, D. M. (2004). *E-government* and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes. *Public Administration Review*, 64(1), 15-27.

Wicaksono, Gilang Satryo, and Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6.1 (2022): 1016-1028.

Wicaksono, W. K., 2015, Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 1, Mei: 3-15.

- Widaningrum, V. D., & Fahriani, F. Z. (2023). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN RESPONSIVITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 2425–2435. <https://doi.org/10.56457/jimk.v10i2.286>
- Wijayanti, W., Warno, W., & P, A. K. (2020). Influence Good Governance on the Quality of Financial Statements with SIMDA as Variables Moderating Government in Pati Regency. *Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS)*, 1(2), 58. <https://doi.org/10.22441/jiess.2020.v1i2.002>.
- World Bank. (1996). Worldwide Governance Indicators. <http://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- World Bank. (2001). *e-government*.
- World Bank. (2017). Why is there an increased focus on fraud worldwide? What are the most common types of fraud in the public sector? Centre for Financial Reporting Reform.
- Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh *E-government*, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 148. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.184>
- Wulandari, R. (2015). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yanti, N. S., Made, A., & Wahyu, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi

Empiris pada OPD Kota Malang). *Jurnal riset mahasiswa akuntansi (jrma)*, 8(1), 1-8.

Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal bisnis & ekonomi*, 4(1), 56-64. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8718>

Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303. <https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>.

## TENTANG PENULIS

**Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.,Ak.** merupakan professor pada bidang Ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Publik, pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Beliau merupakan lulusan S1 Akuntansi Universitas Lampung (1988), S2 Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2021), dan S3 Akuntansi Universitas Padjadjaran (2014). Penulis banyak menulis paper publikasi karya ilmiah dan buku di bidang Akuntansi Publik, juga mengajar beberapa mata kuliah terkait Akuntansi Publik, selain itu juga merupakan reviewer pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi S2 Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung periode 2017 s.d sekarang.